



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : LEGISLATIF
LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)
UNIT KERJA : FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BOBBY ADHITYO RIZALDI
2. Jabatan : ANGGOTA DPR RI
3. NHK : 266603

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **16.020.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 354 m²/202 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1054 m²/500 m² di KAB / KOTA OGAN KOMERING ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 700 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH TANPA AKTA Rp. 5.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m²/102 m² di KAB / KOTA KOTA PRABUMULIH , HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m²/29 m² di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 477.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/300 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000.000
7. Tanah Seluas 240 m² di KAB / KOTA BOGOR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 240.000.000
8. Tanah Seluas 323 m² di KAB / KOTA BOGOR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 323.000.000
9. Tanah Seluas 507 m² di KAB / KOTA MALANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **4.485.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000



2. MOBIL, TOYOTA HARRIER Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000	
3. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 2.250.000.000	
4. MOBIL, TOYOTA ALPHARD 2.5 G A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 1.385.000.000	
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. 120.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp. ---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp. 4.051.626.231
F. HARTA LAINNYA	Rp. ---
Sub Total	Rp. 24.676.626.231
III. HUTANG	Rp. 754.020.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp. 23.922.606.231

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.